



**LAPORAN KINERJA (LKJ)
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN
PERSANDIAN
KABUPATEN SUKABUMI**



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN**

Jalan Raya Perintis Kemerdekaan Telp./Fax. (0266) 320255
Cikembang - Sukabumi

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas Karunia-Nya Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Sukabumi dapat menyelesaikan semua program dan kegiatan di bidang Komunikasi dan Informatika pada Tahun 2021. Dalam Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, merupakan gambaran mengenai program kegiatan dan kinerja pada setiap Tahun Anggaran berjalan, maka kami dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukabumi menyajikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2021 dengan sistematisa sebagaimana yang telah diilustrasikan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Kami menyadari bahwa dalam penyajian Laporan Kinerja Tahun Anggaran 2021 ini masih banyak terdapat kekurangan, hal ini akan dijadikan bahan koreksi kami lebih lanjut di masa - masa yang akan datang.

Demikian untuk dijadikan bahan sebagaimana mestinya, semoga Allah SWT senantiasa memberikan Taufik dan Hidayah-Nya pada kita semua. Amin.

Sukabumi, Februari 2022

KEPALA DINAS,



EKA NANDANG NUGRAHA, S.IP., MM
Pembina Tk.1 IV/b
NIP.19670903 199601 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB. I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	2
1.3 Isu Strategis	2
1.4 Struktur Organisasi	3
1.4 Dasar Hukum	6
BAB. II PERENCANAAN KINERJA	8
2.1 Rencana Strategis Dinas	8
2.2 Perjanjian Kinerja	15
BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA	21
3.1 Pengukuran kinerja	22
3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	24
3.3 Akuntabilitas Kinerja / Realisasi Anggaran	31
BAB. IV PENUTUP	34
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Salah satu tujuan penyelenggaraan pemerintahan adalah mewujudkan suatu tata pemerintahan yang baik (*good governance*) yaitu suatu pemerintahan yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Sukabumi dituntut untuk dapat mewujudkan *good governance* tersebut dengan baik mengacu pada berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain TAP MPR Nomor XI Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN, UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN dan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Peraturan Presiden No. 29 tahun 2014 serta . Salah satu inti pokok dari berbagai peraturan tersebut adalah bahwa setiap instansi pemerintah diwajibkan mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP). Tujuan mengimplementasikan Sistem AKIP ini adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik, bersih dan terpercaya.

Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan di bidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik yang dituntut juga untuk menyampaikan akuntabilitas kinerjanya melalui penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2021. Laporan Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Tahun 2021 disusun dengan berpedoman pada Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 yang di tetapkan pada Tanggal 16 Agustus 2016. Sehingga sasaran, program, indikator dan target kinerja Dinas pada Laporan Kinerja Tahun 2020 ini mengacu kepada sasaran, program, indikator dan target kinerja yang di tetapkan pada RPJMD Tahun 2016-Tahun 2021.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika ini adalah sebagai bahan pelaporan tahunan dari kinerja Dinas tersebut dengan berpedoman pada RPJMD, Renstra, Renja, PK dan Peraturan Bupati No. 18 Tahun 2019 tentang Indikator kinerja Utama tahun 2019 yang telah dilaksanakan s/d triwulan ke IV pada tahun 2021 dengan tujuan memberi informasi tentang hasil Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian yang telah dilaksanakan pada tahun yang bersangkutan.

tujuannya adalah :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan dalam meningkatkan kinerja.

1.3. ISU STRATEGIS

Isu Strategis Dinas dengan mengidentifikasi permasalahan yang di hadapi di Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan melalui :

1. Kompetensi dan Kualifikasi SDM Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian masih terbatas;
2. Sarana Prasarana dan fasilitas Komunikasi, Informatika dan Persandian masih terbatas;
3. Belum terintegrasinya Sistem Komunikasi, Informatika dan Persandian (SPBE) dengan seluruh Perangkat Daerah dan pihak stackholder terkait;
4. Keterbatasan Anggaran dalam rangka pembangunan, pemeliharaan dan pengembangan di bidang Komunikasi, Informatika dan Persandian.

Dengan melalui telaahan dari Visi dan Misi Program Kepala Daerah dengan pandangan bahwa Pemerintah Kabupaten merumuskan perencanaan Pembangunan dengan merepresentasikan keinginan Kepala Daerah terpilih selama masa kepemimpinannya bahwa Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD kabupaten Sukabumi periode 2016-2021 sebagai berikut :

**“TERWUJUDNYA KABUPATEN SUKABUMI YANG RELIGIUS DAN
MANDIRI”**

Hal tersebut pada intinya adalah Pemerintah Kabupaten Sukabumi melaksanakan Pembangunan daerah dengan tetap berpegang pada moral dan akhlak dalam pelaksanaan tugas perlu menanamkan kejujuran kedisiplinan, keterbukaan, tanggungjawab sehingga dapat memberikan laporan yang akuntabel, dengan Misi Bupati Sukabumi di Dinas Komunikasi dan Informatika tercantum dalam RPJMD , yaitu Misi ke 3 :

**“MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN
PROFESIONAL”**

1.4. STRUKTUR ORGANISASI

Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Sukabumi adalah unsur pelaksana Otonomi Daerah dibidang Komunikasi, Informatika dan Persandian yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Sukabumi di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi dan Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 101 Tahun 2019 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Sukabumi, dengan Fungsi sebagai berikut:

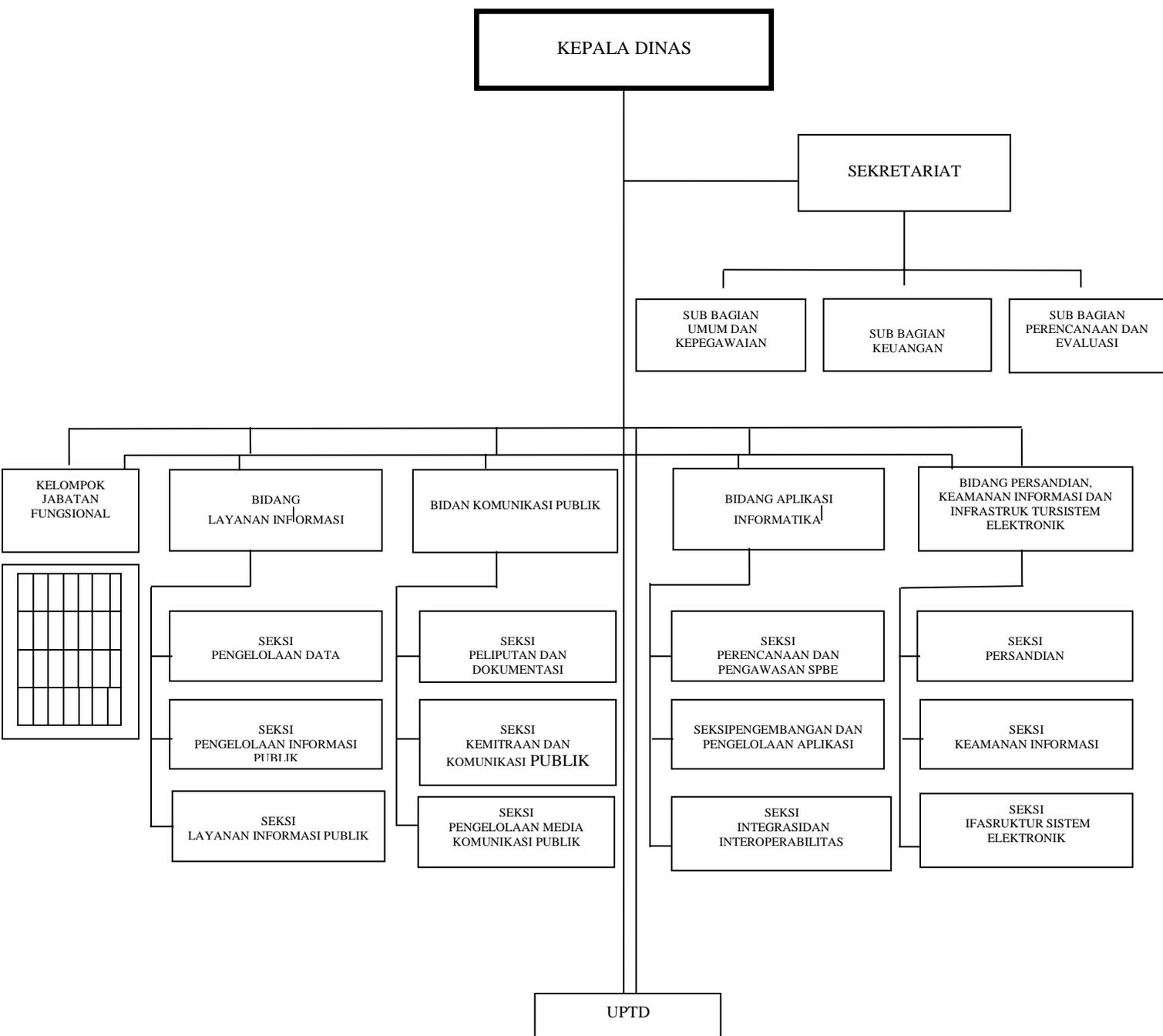
- a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang Komunikasi, Informatika Persandian dan Statistik;
- b. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang Layanan Informasi; Bidang Komunikasi Publik, Bidang Aplikasi Informatika; Bidang Persandian, Keamanan Informasidan Infrastruktur Sistem Elektronik; kelompok jabatan fungsional; dan unit kerja lain dilingkungan Dinas;
- c. Penyelenggaraan pengelolaan nama domain dan sub domain daerah kabupaten;
- d. Penyelenggaraan pengelolaan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) daerah kabupaten;
- e. Penyelenggaraan layanan pengaduan masyarakat;
- f. Penyelenggaraan sistem informasi pelayanan publik daerah kabupaten;
- g. Penyelenggaraan persandian dan keamanan informasi daerah kabupaten;
- h. Penyelenggaraan statistik sektoral daerah kabupaten;
- i. Pembinaan administrasi dilingkungan dinas;
- j. Pembinaan penyelenggaraan pelayanan publik dilingkungan dinas;

- k. Penyelenggaraan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- l. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
- m. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
- n. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas sesuai Peraturan Bupati Nomor 101 Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2. Sub Bagian Keuangan, dan
 - 3. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi
- c. Bidang Layanan Informasi, membawahkan:
 - 1. Seksi Pengelolaan Data,
 - 2. Seksi Pengelolaan Informasi Publik; dan
 - 3. Seksi Layanan informasi Publik.
- d. Bidang Komunikasi Publik, membawahkan :
 - 1. Seksi Peliputan dan Dokumentasi;
 - 2. Seksi Kemitraan dan Komunikasi Publik; dan
 - 3. Seksi Pengelolaan Media Komunikasi Publik;
- e. Bidang Aplikasi Informatika, membawahkan :
 - 1. Seksi Perencanaan dan pengawasan SPBE;
 - 2. Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi; dan
 - 3. Seksi Integrasi dan Interoperabilitas;
- f. Bidang Persandian, Keamanan Informasi dan Infrastruktur Sistem Elektronik, membawahkan :
 - 1. Seksi Persandian;
 - 2. Seksi Keamanan Informasi; dan
 - 3. Seksi Infrastruktur Sistem Elektronik;
- g. UPTD ;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur Organisasi Dinas sebagaimana gambar 2.1 sebagai berikut :



----- GARIS KOMANDO

----- GARIS KOORDINASI

1.5. LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2019 mengacu pada :

1. Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi dan Nepotisme;
2. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
5. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
9. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
10. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
12. Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tanggal 21 April 2014 , tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah di

Kabupaten Sukabumi;

18. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Kabupaten Sukabumi;
19. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021;
20. Peraturan Bupati Sukabumi nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021;
21. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 64 tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah/Laporan Kinerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi;
22. Peraturan Bupati Sukabumi nomor 101 Tahun 2019 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukabumi.
23. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Utama.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS DINAS

Perencanaan kerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan di dasarkan kepada Sasaran strategis Dinas Tahun 2016 s/d 2021. Adapun Sasaran Strategis Dinas Tahun 2021 mengacu pada RPJMD Kabupaten Sukabumi yang menjabarkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi yang di ditetapkan dalam visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukabumi periode 2016-2021 yaitu :

“Terwujudnya Kabupaten Sukabumi yang Religius dan Mandiri”

Visi tersebut mengandung dua elemen penting dalam capaian pembangunan Kabupaten Sukabumi periode 2016-2021 yakni religius dan mandiri. Melalui dua elemen tersebut maka dapat ditelaah bahwa kepala daerah ingin membangun Kabupaten Sukabumi menjadi sejahtera dengan tetap mempertahankan moral religiusitas dan kemandirian masyarakat seperti yang tergambar pada gambar berikut :

Gambar 2.1

Gambar Hubungan Antar Elemen Visi Pembangunan Kabupaten Sukabumi



Berdasarkan identifikasi visi pembangunan, maka ditetapkan misi Pembangunan Daerah Jangka Menengah Kabupaten Sukabumi sebagai berikut:

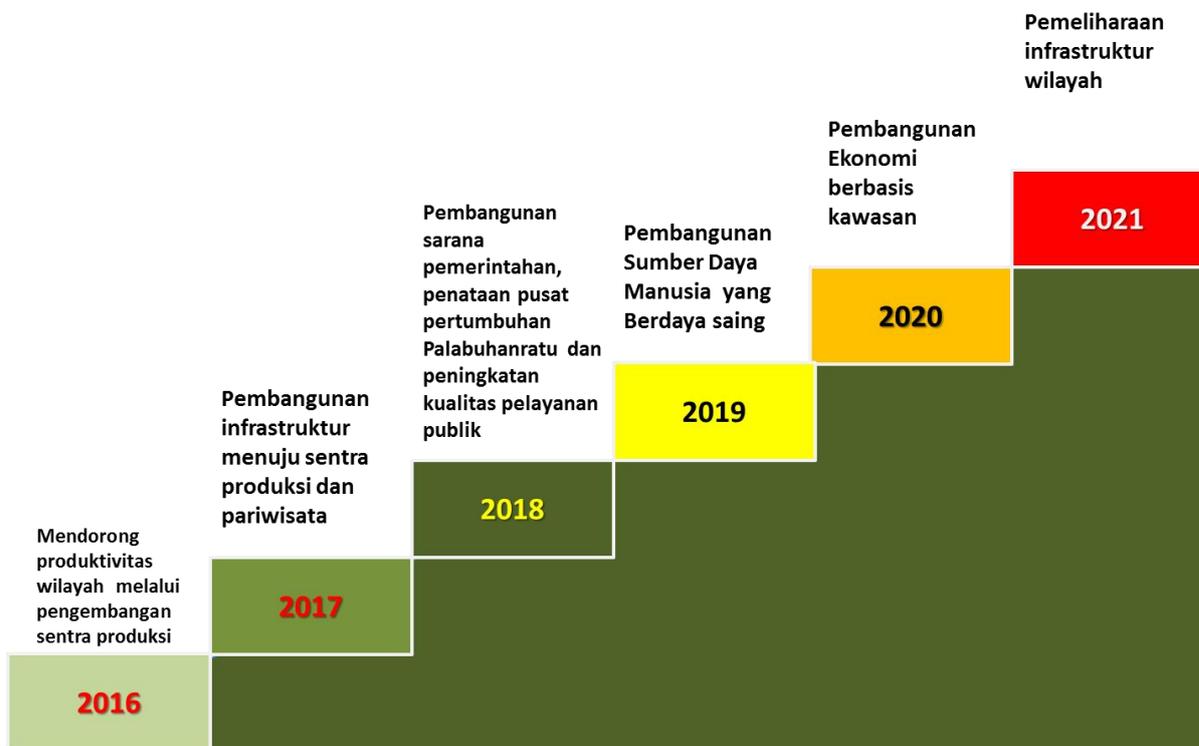
1. Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis ekonomi lokal melalui bidang agribisnis, pariwisata dan industri yang berwawasan lingkungan;
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing dan religius;
3. **Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional; dan**
4. Optimalisasi pelayanan kesehatan, pendidikan dan infrastruktur daerah.

Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Sukabumi mengemban misi nomor 3 yaitu **Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional.**

Misi Nomor 3, **Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional** di tetapkan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang jujur, bersih, dan pro rakyat sebagai pengejawantahan dari prinsip-prinsip dasar *good governance*. *Good Governance* diperlukan semangat dan tekad yang kuat dari para aparatur negara. Fasilitas yang sudah disediakan dalam mencapai hal tersebut adalah dengan melaksanakan Reformasi Birokrasi secara utuh dan konsisten sebagai bagian dari perbaikan tata kelola pemerintahan. Misi ini di jabarkan melalui pelaksanaan kewenangan daerah salah satunya adalah urusan komunikasi informatika, urusan persandian dan urusan Statistik, tahun 2021 menitik berat pada pemeliharaan infrastruktur wilayah. Berikut merupakan gambar Fokus/Tema Pembangunan Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021 (RPJMD) :

Gambar 2.2

Fokus/Tema Pembangunan Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021 (RPJMD)



Adapun Sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 – 2021, pada Dinas Komunikasi informatika dan Persandian Kabupaten Sukabumi adalah sebagai berikut :

1. Urusan komunikasi informatika, sasaran strategisnya meliputi :
 - a. Persentase Jumlah Informasi yang dipublikasikan melalui media yang dikelola pemerintah daerah, media massa, media cetak & media online;
 - b. Rasio Fasilitas Prasarana Sarana di Seluruh Satuan Kerja Serta Sistem yang Terintegrasi;
 - c. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Sukabumi berbasis IT menuju e-government.

Dengan diberlakukannya Peraturan Bupati No 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Sasaran dan Indikator Kinerja Utama maka Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian yang didalamnya mengurus juga tentang statistik dari tiga sasaran kemudian diubah menjadi (satu) sasaran dan 2 (dua) Indikator sebagai berikut :

Sasaran Strateginya : Meningkatnya Kualitas Birokrasi dan Kualitas Pelayanan Publik.

Terdiri 2 (dua) Indikator Kinerja Utama Yaitu:

1. Rasio Fasilitas Prasarana Sarana di seluruh Satuan Kerja Serta Sistem yang Terintegrasi.
2. Prosentase jumlah informasi yang dipublikasikan melalui media yang dikelola Pemerintah Daerah, Media Massa, Media Cetak dan Media Online.

Indikator diatas memuat beberapa program utama Dinas meliputi :

- A. Urusan Komunikasi Informatika, dilaksanakan melalui 2 (dua) program diantaranya :
 - a. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
 - b. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika.
- B. Urusan Persandian, dilaksanakan melalui 1 (satu) program diantaranya :
 - a. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi.
- C. Urusan Statistik, dilaksanakan melalui 1 (satu) program diantaranya :
 - a. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral.

Program dan indikator capaian kinerja dinas mengalami perubahan dalam hal nomenklatur program, kegiatan dan penambahan program serta sub kegiatan sesuai dengan SIPD dan kepmendagri 050 tahun 2020 tentang verifikasi dan validasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sehingga pada RPJMD 2016-2021 lebih terarah, terinci, detil dan fokus pada program yang dipilih sesuai rumpun pelaksanaan fungsi dan capaian target kinerja. Untuk memudahkan transformasi program utama Dinas antara nomenklatur program lama dengan nomenklatur program baru dapat di lihat pada Matrik sanding penyelarasan berikut ini :

Tabel 2.1.

Matrik Sanding Penyelarasan Program Dinas

No	Program RPJMD 2016-2021	No	Program RPJMD 2016-2021 Setelah penyesuaian SIPD kepmendagri 050
1	Program peningkatan publikasi dan kerjasama informasi daerah	1	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
2	Program Pengembangan Sistem Informasi dan Teknologi Informasi	2	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
		3	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
		4	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

Selanjutnya dalam analisis laporan kinerja Tahun 2021 masih berada pada masa pandemi Covid-19 sehingga terjadi keterbatasan anggaran dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, maka perlu kiranya melakukan rencana aksi pada tahun berikutnya. adapun untuk memudahkan melakukan analisis capaian kinerja Tahun 2021 di awal tahun dan pada masa berlakunya nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan baru berdasarkan kepmendagri 050 tahun 2020, maka terdapat sedikit penyesuaian pemetaan indikator kinerja Dinas. Target tetap namun Pagu Indikatif yang berubah disesuaikan kebutuhan, indikator kinerja Dinas, penetapan indikator pada RPJMD 2016-2021 lebih mengedepankan pencapaian kinerja dinas pada bidang pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, di bidang peningkatan pelayanan dan kinerja Komunikasi. Untuk lebih memudahkan kinerja dinas RPJMD 2016-2021. Dalam melaksanakan pengukuran kinerja maka perlu dilakukan upaya atau arah strategi yang harus dilakukan oleh dinas Komunikasi Informatika dan Persandian agar memudahkan didalam penyampaian informasi bahwa dasar pencapaian target didasarkan atas target yang telah di cantumkan dalam RPJMD walaupun kenyataannya target tersebut belum mencerminkan pada kebutuhan dinas karena dinas ini baru transisi pemisahan dari Dishub Kominfo pada Tahun 2016 di pisah menjadi 2 dinas yaitu Dinas Perhubungan dan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian muliai dilaksanakan di tahun 2017 sampai dengan sekarang, untuk di tahun 2021 disamping mengurus bidang Komunikasi Informatika dan persandian juga mengurus tentang Statistik.

Untuk mengetahui arah strategis yang telah dan akan dilakukan oleh dinas Komunikasi Informatika dan Persandian, maka sasaran strategi yang harus dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan persandian sesuai dengan RPJMD, melalui penyampaian informasi dengan media dengan rencana pembangunan website, pelaksanaan e- government, keamanan informasi dsb. Dengan melihat dari kondisi akhir dari tahun 2015 dan tahun 2016 dilaksanakan masih dishubkominfo yaitu gabungan antara dinas perhubungan dengan dinas Komunikasi Informatika dan Persandian yang pada tahun 2017 diskominfo menjadi Dinas tersendiri, untuk target nya bila dilihat dari tabel berikut pada tahun 2021 targetnya di RPJMD dan disesuaikan dengan Peraturan Bupati No. 18 tahun 2019, dan untuk mengetahui lebih detil dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel 2.2
SASARAN STRATEGIS JANGKA MENENGAH

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL TAHUN 2015	TARGET						KODISI AKHIR TAHUN 2021
					THN 2016	THN 2017	THN 2018	THN 2019	THN 2020	THN 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11
	Meningkatnya Kualitas Birokrasi dan Kualitas Pelayanan Publik	Prosentase Jumlah Informasi yang dipublikasikan melalui Media yang dikelola Pemerintah Daerah , media massa, media cetak dan meia online			-	-	-	90	95	100	100
	Meningkatnya kualitas Birokrasi dan Kualitas Pelayanan Publik	Rasio Fasilitas Prasarana Sarana di Seluruh Satuan Kerja serta Sistem yang Terintegrasi			-	-	-	40	55	70	70

Sasaran strategis sebelumnya terdiri dari 3 sasaran strategi yaitu:

- a. Meningkatnya penyebaran informasi Pemda terhadap Masyarakat luas baik internal maupun eksternal kabupaten melalui jalinan komunikasi dan kerjasama dengan media massa baik media cetak, radio, televisi maupun media online;
- b. Meningkatnya Penyebaran Informasi Pemda terhadap Masyarakat luas baik internal maupun eksternal Kabupaten melalui Media yang dikelola oleh Pemerintah Daerah (website, System Elektronik serta Media Sosial) dan melalui media tradisional;
- c. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Sukabumi berbasis IT menuju e-government;

Disesuaikan dengan Perub No 18 tahun 2019 menjadi 1 (satu) sasaran yaitu meningkatnya kualitas birokrasi dan kualitas pelayanan Publik dan 2 (dua) indikator sbb:

- a. Prosentase Jumlah Informasi yang dipublikasikan melalui Media yang dikelola Pemerintah Daerah, media massa, media cetak dan media online untuk tahun 2019 target sebesar 90 %, untuk tahun 2020 target sebesar 95 % dan target untuk tahun 2021 sebesar 100 %
- b. Rasio Fasilitas Prasarana Sarana di Seluruh Satuan Kerja serta Sistem yang Terintegrasi untuk tahun 2019 ditarget sebesar 40 %, untuk tahun 2020 ditarget sebesar 55 dan untuk tahun 2021 ditarget sebesar 70 %

Untuk melihat alur dari suatu Program kerja Dinas Komunikasi dan Persandian dalam melaksanakan Program kerja Pemerintah Daerah yang harus dilaksanakan oleh dinas ini maka dibuat alur tersebut dalam bentuk tabel Cascading.

2.2. PERJANJIAN KINERJA

Adapun sebagai dasar komitmen dari melaksanakan Program dan kegiatan tersebut dibuatkan perjanjian kinerja kepada masing masing pemegang kegiatan agar dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan kewenangannya, dan mempunyai tugas dan kewenangan masing masing secara berjenjang, dengan menitik beratkan pada sasaran strategis, indikator kinerja dan komitmen target yang diharapkan, hal tersebut dapat dilihat pada tabel sbb :

Tabel 2.3

TABEL PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 PERANGKAT DAERAH

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kualitas Birokrasi dan Kualitas Pelayanan Publik	Rasio Fasilitas Prasarana Sarana di Seluruh Satuan Kerja Serta Sistem yang Terintegrasi	70%
2	Meningkatnya Kualitas Birokrasi dan Kualitas Pelayanan Publik	Prosentase Jumlah Informasi yang dipublikasikan melalui media yang dikelola Pemerintah Daerah, Media Massa, Media Cetak dan Media Online	100%

NO	PROGRAM	ANGGARAN	TARGET
1	2	3	4
1	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	6.530.833.700,00	70%
2	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	3.033.968.480,00	100%

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Tahun 2021 berpedoman pada Program dan Indikator serta Target Kinerja Urusan Urusan Komunikasi dan Informatika berdasarkan RPJMD Kabupaten Sukabumi 2016-2021 dengan dilakukan penyempurnaan melalui Perbup No. 18 tahun 2019 dengan mengacu pada penyelerasan program sebagaimana tersebut pada tabel di atas adalah sebagai berikut:

- a. Urusan Komunikasi dan Informatika, di laksanakan melalui program :
 - 1) Program Pengelolaan Aplikasi Informatika;
Program ini di jabarkan dalam indikator kinerja yaitu Rasio Fasilitas Prasarana Sarana di seluruh Satuan Kerja Serta Sistem yang Terintegrasi.
 - 2) Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik.
Program ini di jabarkan dalam indikator kinerja yaitu Prosentase Jumlah Informasi yang dipublikasikan melalui Media yang dikelola Pemerintah Daerah, Media Massa, Media Cetak dan Media Online.
- b. Urusan Persandian, di laksanakan melalui program :
 - 1) Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
- c. Urusan Statistik, di laksanakan melalui program :
 - 1) Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Matrik RPJMD Urusan Komunikasi Informatika dan Urusan Komunikasi berdasarkan RPJMD Tahun 2016-2021 yang telah disesuaikan dengan Perbub 18 tahun 2019 dan kepmendagri 050 tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Strategi	Kebijakan Umum	Program (kepmen 050 2020)	Urusan
1	2	3	4	5	6	7
Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya Kualitas Birokrasi dan Kualitas Pelayanan Publik	1. Prosentase jumlah informasi yang di publikasikan melalui media yang dikelola	Mengembangkan sistem penjalinan dan kerjasama dengan Media	Peningkatan penjalinan dan kerjasama dengan Media Massa Publik dan	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	DKIP

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Strategi	Kebijakan Umum	Program (kepmen 050 2020)	Urusan
1	2	3	4	5	6	7
Kabupaten Sukabumi yang mendukung E-Government		Pemerintah Daerah , Media Massa, Media Cetak dan media Online	Massa public dan Daerah	Daerah		
	Meningkatnya Kualitas Birokrasi dan Kualitas Pelayanan Publik	Rasio Fasilitas Prasarana Sarana di Seluruh Satuan Kerja serta Sistem yang Terintegrasi	Mengembangkan Sistem Informasi dan Informatika	Peningkatan infrastruktur dan sistem elektronik, sarana prasarana dan TIK	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	

Sumber : RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 – 2021, Perbup 18 tahun 2019, Kepmendagri 050 2020

Untuk merealisasikan perjanjian kinerja Dinas Tahun 2021 sesuai dengan RPJMD dan disesuaikan dengan Peraturan Bupati No. 18 tahun 2019 dan Kepmendagri 050 tahun 2020 Kabupaten Sukabumi dan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian serta melaksanakan Perjanjian Kinerja yang ditetapkan melalui 2 (dua) Program utama IKU dan 2 Program penunjang tambahan sebagaimana rincian perjanjian kinerja tersebut dalam uraian di bawah ini:

1. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Berdasarkan target RPJMD 2016-2021, pada tahun 2021, Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian menargetkan capaian indikator kinerja melalui pencapaian indikator kinerja Tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel 2.5

Target Indikator Kinerja pada Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Indikator Kinerja	Satuan	Target
Prosentase Jumlah Informasi yang dipublikasikan melalui media yang dikelola Pemerintah Daerah, Media Massa, Media Cetak dan Media Online	%	100

Program ini dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan dan 5 (lima) sub kegiatan di tahun 2021 dengan alokasi anggaran sebesar Rp 3.033.968.480,- dan terealisasi sebesar Rp 3.032.996.000,- atau sebesar 99,97%, dengan rincian Kegiatan sebagai berikut :

A. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari beberapa sub kegiatan meliputi:

1. Sub kegiatan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik, anggaran Rp 84.717.100, realisasi anggaran Rp 84.717.100 atau 100%. Keluaran sub kegiatan Pengembangan Web / Aplikasi / Sistem Informasi Sederhana SIMEMOKAMI target: 1 paket dan Rapat Koordinasi Satgas Covid-19 target: 6 bulan.
2. Sub kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik. Anggaran Rp 766.532.880 realisasi Anggaran Rp 765.560.400 Atau 99.87%. Keluaran sub kegiatan ini adalah Cetak Photo Bupati Dan Wakil Bupati target: 950 buah; Belanja Konten Videotron Publikasi Covid 19, Vaksin dan PHBN Serta PHBI Melalui Konten target: 12 kali; Belanja Pemeliharaan Videotron target: 5 bulan; Peliputran Kegiatan Pemda target: 12 bulan; Pemeliharaan Radio target: 3 bulan; Publikasi Covid 19, Vaksin dan PHBN Serta PHBI Melalui Konten target: 12 bulan.
3. Sub kegiatan Pelayanan Informasi Publik. Anggaran Rp 20.000.000 realisasi anggaran Rp 20.000.000 atau 100%. Keluaran kegiatan ini berupa Draft Perbub PPID 1 dokumen.
4. Sub kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik. Anggaran Rp 21.185.000 realisasi anggraan Rp 21.185.000 atau 100%. Keluaran sub kegiatan ini adalah Rapat Internal KIM 6 bulan; Belanja Sertifikat 600 Buah; Belanja Jasa Iklan / Reklame, Film, dan Pemotretan 1 buah.
5. Sub kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas. Anggaran Rp 2.141.533.500, realisasi anggaran Rp 2.141.533,500

atau 100%. Keluaran sub kegiatan ini Belanja Jasa Publikasi Kerjasama Dengan Media Cetak 1 paket; Belanja Jasa Publikasi Kerjasama Dengan Media Online 12 bulan; Belanja Jasa Publikasi Kegiatan Pemda di Media Cetak dan Online 12 bulan; Tersebarnya Informasi Pembangunan Pemda 12 bulan; Belanja Langganan Surat Kabar 12 bulan; Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 12 bulan; Belanja Jasa Publikasi Kerjasama Di Media Insidental 12 bulan.

B. Program Pengembangan Sistem Informasi dan Teknologi Informasi

Berdasarkan target RPJMD 2016-2021 yang telah disesuaikan dengan Peraturan Bupati No. 18 tahun 2019 dan juga Kepmendagri 050 tahun 2020, Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian menargetkan capaian indikator kinerja meliputi pencapaian indikator kinerja Tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel 2.6

Target Indikator Kinerja Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

Indikator Kinerja	Satuan	Target
1. Rasio Fasilitas Prasarana Sarana di Seluruh Satuan Kerja Serta Sistem yang Terintegrasi	%	70

Program ini dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan dan 6 (enam) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 6.530.833.700,00 dengan realisasi sebesar Rp 6.157.872.596,- atau sekitar 94% rincian kegiatan sebagai berikut :

A. Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut:

1. Sub kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra, dengan anggaran Rp234.374.200 realisasi Rp 227.211.648 atau 96.94%. Keluaran kegiatan ini adalah Instalasi Wifi managed Service (wms) baru Lingkup DISKOMINFOSAN 3 titik; Belanja Lisensi Zoom Meeting Pro 5 kali/tahun; Layanan Wifi managed Service (wms) Lingkup DISKOMINFOSAN 29 titik/bulan.

B. Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut :

1. Sub kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten, dengan anggaran Rp 254,918,000 realisasi Rp 254,918,000 atau 100%. Keluaran kegiatan ini adalah Tersedianya Dokumen Kajian Roadmap SPBE 1 dokumen.
2. Sub kegiatan Koordinasi dan Sikronisasi Data dan Informasi Elektronik, dengan anggaran Rp 600,000,000 realisasi anggaran Rp 600,000,000 atau 100%. Keluaran kegiatan ini adalah Tersedianya rak Server untuk penyimpanan Server dan data Center Kab. Sukabumi 1 unit; Belanja Rutin Sewa Rak Server 12 bulan.
3. Sub kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas. Pagu anggaran Rp 90,723,000 realisasi anggaran Rp 90,597,548 atau 99,86%, Keluaran kegiatan ini adalah Koordinasi pengembangan dan pengelolaan Ekosistem Kota Cerdas 1 Dokumen; Tersedianya Jasa Komunikasi Pimpinan 7 paket; Tersedianya Lisensi Office 365 untuk Mendukung Kinerja 4 pack.
4. Sub kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumberdaya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah, dengan anggaran Rp 818,700 realisasi anggaran Rp 818,700 atau 100%, Keluaran kegiatan ini adalah Operasional Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah 3 bulan.
5. Sub kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah (Banprov), dengan anggaran Rp 5,350,000,000 realisasi anggaran R 4,984,326,700 atau 93.16%, Keluaran kegiatan ini adalah Tersediannya Command Center 1 paket.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. PENGUKURAN KINERJA DINAS

Pengukuran kinerja dilakukan untuk menjelaskan capaian kinerja organisasi daerah, yang berisi penyajian capaian kinerja pada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian dari setiap pernyataan kinerja sasaran strategi Kominfo yang disesuaikan dengan hasil pengukuran kinerja pemerintah daerah, laporan kinerja pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja (Permenpan No. 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah). Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja tahun 2020 sebelumnya, adapun pengukuran dilakukan pada dasarnya pada tahun 2021 dengan membandingkan antara realisasi dengan target dengan melihat dari target akhir renstra pada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukabumi menggunakan pijakan Permendagri No. 54 tahun 2010 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Pengukuran Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN TAHUN SEBELUMNYA	TAHUN 2021			TARGET AKHIR RENSRA	CAPAIAN TAHUN 2021 TERHADAP TARGET AKHIR RENSTRA (%)
				TARGET	REALISASI	% REALISASI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Meningkatnya Kualitas Birokrasi Dan Kualitas Pelayanan Publik	Persentase jumlah informasi yang dipublikasikan melalui Media yang dikelola Pemerintah Daerah, Media Massa, Media Cetak dan Media Online	95	100	3.032	99.97	100 %	
	Meningkatnya Kualitas Birokrasi Dan Kualitas Pelayanan Publik	Rasio Fasilitas Prasarana Sarana di seluruh Satuan Kerja Serta Sistem yang terintegrasi	55	70	6.157	94	100 %	

Dari tabel tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

untuk sasaran sebelumnya di tahun 2019 terdiri dari 3 sasaran dan 6 indikator, setelah penyesuaian berdasarkan Perbup 18 tahun 2020 dan Kepmendagri 050 tahun 2020 pada saat ini menjadi 1 (satu) sasaran dan 2 (dua) Indikator dengan nomenklatur yang sudah disesuaikan sebagai berikut:

1. Prosentase Jumlah Informasi yang dipublikasikan melalui media yang dikelola Pemerintah Daerah, Media Massa, Media Cetak dan Media online dengan target sebesar 100 % dan realisasi sebesar Rp 3.032.996.000,00 atau persentase realisasi sebesar 99.97% dengan realisasi target renstra yang ditetapkan adalah 100%
2. Rasio Fasilitas Prasarana sarana dan seluruh satuan kerja serta system yang Terintegrasi di targetkan sebesar 70 % dengan realisasi sebesar Rp. 6.157.872.596,00 atau sekitar 94 % dengan realisasi target renstra yang ditetapkan adalah 70%.

3.2. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian dalam melaksanakan Program Kerja berdasarkan beberapa sasaran dengan melakukan evaluasi dan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

- a. **Membandingkan antara target dan realisasi kinerja pada tahun ini melalui tabel sebagai berikut :**

Tabel.3.2

No	sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Tahun 2021		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Kualitas Birokrasi dan Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Jumlah Informasi yang di Publikasikan melalui Media yang dikelola Pemerintah daerah , Media Massa, Media Cetak dan Media Online	100	100	100
2	Meningkatnya Kualitas Birokrasi dan Kualitas Pelayanan Publik	Rasio Fasilitas Prasarana Sarana di Seluruh Satuan Kerja Serta system yang Terintegrasi	70	70	100

Dari tabel tersebut dapat di jelaskan sebagai berikut :

Sasaran Strategis yaitu meningkatnya kualitas birokrasi dan kualitas pelayanan Publik dengan indikator sebagai berikut :

- a. Meningkatnya kualitas birokrasi dan kualitas pelayanan publik dengan indikator Persentase jumlah Informasi yang di publikasikan melalui Media yang di kelola Pemerintah Daerah, Media massa, Media Cetak, dan Media Online dari target yang direncanakan pada Perbup No. 18 tahun 2019 adalah sebesar 100 % dengan realisasi sebesar 100% capaiannya adalah sebesar 100%

- b. Rasio Fasilitas Prasarana Sarana di seluruh Satuan Kerja serta Sistem yang terintegrasi direncanakan target sebesar 70 % ternyata terealisasi sebesar 70 % atau capaian 100 %

- b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun yang lalu dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada table sebagai berikut :**

Tabel.3.3

No	sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Tahun		
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Kualitas Birokrasi dan Kualitas Pelayanan Publik	Prosentase jumlah informasi yang dipublikasikan melalui media yang dikelola Pemerintah Daerah, Media Massa, Media Cetak dan Media Online	90	90	100
2	Meningkatnya Kualitas Birokrasi dan Kualitas pelayanan Publik	Rasio Fasilitas Prasarana Sarana di seluruh Satuan Kerja Serta Sistem yang Terintegrasi	40	55	70

Dari tabel tersebut dapat di jelaskan sebagai berikut :

- Sasaran 1 dengan indikator Prosentase jumlah informasi yang dipublikasikan melalui media yang dikelola Pemerintah Daerah, Media Massa, Media Cetak dan Media Online dari target 2020 sebesar 95% pada tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi sebesar 100%
- Sasaran 2 dengan indikator sebagai berikut:
Rasio Fasilitas Prasarana Sarana di seluruh Satuan Kerja Serta Sistem yang Terintegrasi dari target 2020 sebesar 55 % pada tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi sebesar 70%

Untuk di tahun 2021 sesuai Perbup no. 18 Tahun 2019 hanya ada satu sasaran strategis yaitu Meningkatnya kualitas birokrasi dan kualitas pelayanan Publik dengan 2 indikator sebagai berikut :

- a. Prosentase jumlah informasi yang dipublikasikan melalui Media yang dikelola Pemerintah Daerah, Media Massa, Media cetak dan Media Online dengan target yang direncanakan 100%
- b. Rasio Fasilitas Prasarana sarana di seluruh satuan kerja serta Sistem yang Terintegrasi dengan target direncanakan sebesar 70 %
- c. **Membandingkan antara realisasi sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Dinas dapat dilihat pada table sebagai berikut :**

Tabel.3.4

No	sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2021	Target akhir Renstra	Capaian s.d Tahun 2019 terhadap Target Akhir Renstra(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Kualitas Birokrasi dan Kualitas Pelayanan Publik	Persentase jumlah informasi yang dipublikasikan melalui media yang dikelola Pemerintah Daerah, Media Massa, Media Cetak dan Media Online	100	100	100
2	Meningkatnya Kualitas Birokrasi dan Kualitas pelayanan Publik	Rasio Fasilitas Prasarana Sarana di seluruh Satuan Kerja Serta Sistem yang Terintegrasi	70	70	100

Dari tabel tersebut dapat di jelaskan sebagai berikut :

Sasaran Strategi adalah meningkatnya kualitas birokrasi dan kualitas pelayanan Publik dengan indicator sebagai berikut :

- a. Prosentase Jumlah Informasi yang di Publikasikan melalui Media yang di kelola Pemerintah Daerah, Media Massa, Media Cetak dan Media Online adapun realisasi kinerja sampai dengan tahun 2021 sebesar 100% dengan target akhir Renstra sebesar 100 % sehingga capaian samapai dengan tahun 2021 terhadap target akhir Renstra baru tercapai sebesar 100 %
- b. Rasio Fasilitas Prasarana Sarana di Seluruh Satuan Kerja serta Sistem yang terintegrasi realisasi kinerja sampai dengan tahun 2021 mencapai sebesar 70 % dengan target akhir renstra sebesar 70 % sehingga capaian sampai dengan tahun 2021 terhadap target akhir Renstra baru sebesar 100 %

d. Membandingkan antara realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional dapat dilihat pada table sebagai berikut :

Tabel.3.5

No	sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2021	Standar Nasional	Capaian s.d Tahun 2017 terhadap Standar Nasional(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Kualitas Birokrasi dan Kualitas pelayanan Publik	Perentae jumlah informasi yang dipublikasikan melalui media yang dikelola Pemerintah Daerah, Media Massa, Media Cetak dan Media Online	100		
2	Meningkatnya Kualitas Birokrasi dan Kualitas pelayanan Publik	Rasio Fasilitas Prasarana Sarana di seluruh Satuan Kerja Serta Sistem yang Terintegrasi	70		

e. Melakukan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan sebagai berikut :

1. Analisis Penyebab Peningkatan/Penurunan Kinerja

Permasalahan pencapaian prosentasi yang tidak maksimal pada beberapa indikator pada setiap sasaran strategik dinas disebabkan karena beberapa permasalahan sebagai berikut :

- a. SDM yang memiliki kompetensi di bidang komunikasi informatika, persandian dan statistik sangat terbatas;
- b. Cakupan pelayanan di bidang komunikasi informatika, persandian dan statistik sangat luas;
- c. Kurang dukungan peran swasta dan masyarakat dalam pembangunan di bidang komunikasi informatika, persandian dan statistik terutama dalam pengembangan jaringan blankspot;
- d. Anggaran yang tidak ada anggarannya sehingga dilaksanakan dengan memanfaatkan sumberdaya yang dioptimalkan
- e. Terdapat beberapa kegiatan yang anggarannya masih terbatas.

Berbagai permasalahan tersebut di atas tidak mengurangi kinerja dinas dan dapat dicari solusi pemecahannya melalui :

- a. Peningkatan kompetensi SDM melalui pendidikan, pelatihan dan pembinaan;
- b. Meningkatkan peranan Kominfo di wilayah serta peranan bidang Teknis dalam memberikan pelayanan di bidang kominfo di Kabupaten Sukabumi;
- c. Meningkatkan peran swasta, serta peranan dan dukungan masyarakat dalam pembangunan di bidang perhubungan dan kominfo melalui pelaksanaan kegiatan secara bersama sama atau diikut sertakan;
- d. Menyampaikan kebutuhan Anggaran tidak terbatas pada APBD Kabupaten Sukabumi saja tetapi dapat bersumber dari pendanaan lain dan sumberdaya yang ada dengan pengoptimalan sebaik mungkin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Melakukan percepatan pelaksanaan pembangunan sesuai anggaran yang di tetapkan serta kesesuaian anggaran kas yang telah di tetapkan sehingga serapan anggarannya akan lebih baik dan pada akhirnya setiap program pembangunan yang di rencanakan berhasil dengan baik.

- f. Melakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dapat dilihat pada table sebagai berikut :

Tabel 3.6
Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Hanya
Untuk Capaian kinerja $\geq 100\%$)

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	% Capaian Kinerja (Indikator Kinerja Yang \geq 100%)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat efisiensi
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kualitas Birokrasi dan Kualitas pelayanan Publik	Perentae jumlah informasi yang dipublikasikan melalui media yang dikelola Pemerintah Daerah, Media Massa, Media Cetak dan Media Online			
2	Meningkatnya Kualitas Birokrasi dan Kualitas pelayanan Publik	Rasio Fasilitas Prasarana Sarana di seluruh Satuan Kerja Serta Sistem yang Terintegrasi			

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dapat dilihat pada table sebagai berikut :

Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Sasaran

Tabel.3.7

No	Sasaran Strategis	% Capaian	Program	Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Kualitas Birokrasi dan Kualitas pelayanan Publik	100	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2	Meningkatnya Kualitas Birokrasi dan Kualitas pelayanan Publik	70	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten

Dari tabel tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Dari Sasaran Strategi **Meningkatnya Kualitas Birokrasi dan Kualitas Pelayanan Publik** terdiri dari 2 Program yaitu :

- a. Program Informasi dan Komunikasi Publik capaian sebesar 100 % didukung dengan 1 kegiatan dan 5 sub kegiatan yang menunjang pencapaian Program.
- b. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika capaian sebesar 70 % didukung dengan 2 kegiatan dan 6 sub kegiatan yang menunjang pencapaian Program.

3.3. AKUNTABILITAS KINERJA/REALISASI ANGGARAN

Akuntabilitas Kinerja/Realisasi Anggaran adalah kKinerja Perangkat Daerah berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.8

No	sasaran	Indikator Sasaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase	
					Keuangan	Fisik
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Kualitas Birokrasi dan Kualitas pelayanan Publik	Persentase jumlah informasi yang dipublikasikan melalui media yang dikelola Pemerintah Daerah, Media Massa, Media Cetak dan Media Online	3.033.968.480	3.032.996.000	99.97	100
2	Meningkatnya Kualitas Birokrasi dan Kualitas pelayanan Publik	Rasio Fasilitas Prasarana Sarana di seluruh Satuan Kerja Serta Sistem yang Terintegrasi	6.530.833.700	6.157.872.596	94	100

Dari tabel tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Untuk akuntabilitas Kinerja/Realisasi Anggaran melalui Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas Birokrasi dan Kualitas Pelayanan Publik terdiri 2 indikator sasaran yaitu :

- a. Persentase jumlah informasi yang dipublikasikan melalui Media yang dikelola Pemerintah Daerah, Media Massa, Media Cetak dan Media Online dari anggaran sebesar Rp 3.033.968.480,00 terealisasi sebesar Rp 3.032.996.000,00 dengan persentase keuangan sebesar 99.97 dengan fisik sebesar 100 %
- b. Rasio Fasilitas prasarana sarana di sebuah satuan kerja serta sistem yang terintegrasi dari anggaran sebesar Rp 6.530.833.700,00 terealisasi sebesar Rp 6.157.872.596,00 dengan persentase keuangan sebesar 94 % dengan fisik sebesar 100 %

Untuk lebih jelas dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel.3.9.
realisasi kinerja anggaran

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KINERJA			NAMA PROGRAM	KEUANGAN		
			TARGET	REALISASI	% REALISASI		TARGET	REALISASI	% REALISASI
1	2	3	6	7	8	11	6	7	8
1	Meningkatnya Kualitas Birokrasi dan Kualitas pelayanan Publik	Prosentase jumlah informasi yang dipublikasikan melalui media yang dikelola Pemerintah Daerah, Media Massa, Media Cetak dan Media Online	100	100	100	Program Informasi dan Komunikasi Publik	3.033.968.480,00	3.032.996.000,00	99.97
2	Meningkatnya Kualitas Birokrasi dan Kualitas pelayanan Publik	Rasio Fasilitas Prasarana Sarana di seluruh Satuan Kerja Serta Sistem yang Terintegrasi	70	70	100	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	6.530.833.700,00	6.157.872.596,00	94

Dari table tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran Strategis Kominfo adalah Meningkatnya kualitas pelayanan Birokrasi dan kualitas pelayanan Publik dengan 2 (dua) Indikator sebagai berikut :

- a. Prosentase Jumlah Informasi yang di Publikasikan melalui Media yang dikelola Pemerintah daerah, Media Massa, Media Cetak dan media Online dari target kinerja yang direncanakan sebesar 100 % tercapai 100 % sehingga tercapai target sebesar 100 %
- b. Rasio Fasilitas Prasarana sarana diseluruh Satuan Kerja Serta Sistem yang terintegrasi dengan target kinerja yang direncanakan sebesar 70 % tercapai sebesar 70 % sehingga tercapai sebesar 100 %

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian ini merupakan media informasi yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi secara akuntabel kepada publik sesuai dengan potensi dan nilai – nilai yang ada pada Dinas Komunikasi ,informatika dan Persandian. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan Pusat dan Daerah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini diharapkan dapat memberikan penjelasan dan gambaran kepada semua pihak secara menyeluruh tentang kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian pada Tahun 2021 sedangkan dari hasil evaluasi pada tahun 2019 dapat di ketahui bahwa untuk sasaran strategis terdiri dari 3 (tiga) sasaran yaitu :

1. Meningkatnya penyebaran informasi Pemda terhadap Masyarakat luas baik internal melalui jalinan komunikasi dan kerjasama dengan medi massa baik media cetak, radio, televisi maupun media online;
2. Meningkatnya Penyebaran Informasi Pemda terhadap Masyarakat luas baik internal maupun eksternal Kabupaten melalui Media yang dikelola oleh Pemerintah Daerah (website, System Elektronik serta Media Sosial)dan melalui media tradisional;
3. .Meningkatkan kualitas dan kuantitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Sukabumi berbasis IT menuju e-government.

Dengan diberlakukan/ditetapkannya Peraturan Bupati No. 18 tahun 2019 maka mengalami perubahan sebagai berikut :

Hanya ada 1 (satu) sasaran pada tahun 2020 dan 2021 yaitu **Meningkatnya kualitas birokrasi dan kualitas pelayanan Publik** dengan melalui 2 (dua) indikator :

- a. Perentase jumlah informasi yang di publikasikan melalui media yang dikelola Pemerintah Daerah, Media Massa, Media Cetak dan Media Online;
- b. Rasio Fasilitas Prasarana di seluruh Satuan Kerja serta Sistem yang terintegrasi.

B. Rekomendasi

Agar dalam pelaporan kinerja dalam pencapaian target kinerja dapat terukur dengan baik maka, kami memberikan rekomendasi sebagai masukan untuk penetapan indikator pada tahun depan atau dokumen RPJMD periode 2021-2026 dengan rincian sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis Lama	usulan Indikator Kinerja		Keterangan
		sebelum	perubahan	
1	Meningkatnya kualitas birokrasi dan Kualitas pelayanan Publik	Persentase jumlah informasi yang dipublikasikan melalui Media yang dikelola Pemerintah Daerah,Media Massa,Media Cetak dan Media Online	Persentase (%) Informasi publik tentang kebijakan program prioritas pemerintah, disampaikan secara cepat dan tepat	Jadi dapat diketahui dengan melalui berapa jumlah informasi yang dipublikasikan secara tepat dan cepat di bagi jumlah informasi yang ada, dengan seperti ini maka yang menjadi objek adalah informasi publik dan bukan lah cara penyebaran informasinya.
2	Meningkatnya kualitas birokrasi dan Kualitas pelayanan Publik	Rasio Fasilitas Prasarana Sarana di seluruh Satuan Kerja Serta Sistem yang terintegrasi	Persentase Akses TIK yang tersedia	Dapat dihitung dengan formulasi jumlah akses TIK yang tersedia dibagi dengan jumlah akses TIK yang seharusnya ada, dengan seperti ini akan memudahkan Diskominfo dalam melakukan pendataan dan penghitungan capaian kinerja dinas setiap tahunnya selama periode renstra lima tahunan.

No.	Sasaran Strategis Rekomendasi	Program	Keterangan
1	Meningkatnya luas cakupan wilayah komunikasi dan informatika daerah	Program pengelolaan aplikasi informatika	Dengan draft seperti ini akan lebih fokus pada masing-masing objek urusan pemerintahan sehingga proses penghitungan capaian kinerja kedepannya akan lebih udah dan flexible antara 3 urusan pemerintahan yang di akomodir oleh kominfo, yaitu urusan komunikasi informatika, urusan persandian dan urusan statistik
		Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	
		Program Penyelenggaraan Persandian	
		Program Penyelenggaraan Statistik	

Dari rekomendasi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Dari Sasaran awal yaitu **meningkatkan kualitas birokrasi dan kualitas pelayanan publik** akan menjadi kesulitan tersendiri bagi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian untuk dapat mengukur capaian kinerja setiap tahunnya, maka dari hal tersebut kami rekomendasikan sasaran strategis ” Meningkatkan luas cakupan wilayah komunikasi dan informatika daerah” agar penghitungan indikator lebih fokus pada tugas pokok dan fungsi pada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian itu sendiri.

Kita menyadari kendala yang di hadapi di RPJMD adalah belum jelas target untuk Persandian dan Statistik pada tahun 2021 sehingga perlu untuk di sempurnakan pada tahun anggaran kedepannya atau pada periode Renstra dan RPJMD baru kedepannya.

Demikian laporan kinerja yang dapat kami sampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sukabumi, Februari 2022

KEPALA DINAS,



EKA NANDANG NUGRAHA, S.IP., MM

Pembina Tk.1 IV/b

NIP.19670903 199601 1 001

LAMPIRAN

LEVEL KABUPATEN

CASCADING KINERJA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

VISI BUPATI SUKABUMI 2016-2021
TERWUJUDNYA KABUPATEN SUKABUMI YANG RELIGIUS DAN MANDIRI

Sasaran strategis RPJMD

MISI KE-3 DARI 4 MISI
MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN PROVESIONAL

TUJUAN RPJMD
PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DALAM PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KABUPATEN SUKABUMI YANG MENDUKUNG E-GOVERMENT

LEVEL DINAS

Sasaran Strategis RENSTRA

MENINGKATNYA KUALITAS BIROKRASI DAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

Indikator Renstra

Rasio Fasilitas Prasarana Sarana di Seluruh Satuan Kerja Serta Sistem Yang Terintegrasi

Persentase Jumlah Informasi yang di Publikasikan melalui Media yang di kelola Pemerintah Daerah, Media Massa, Media Cetak dan Media Online

Program Renstra

Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Indikator Program

Persentase Jumlah Informasi yang dipublikasikan melalui media yang dikelola pemerintah daerah, media massa, media cetak dan media online

Kegiatan

Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten

Sub Kegiatan

- 4. Monitoring Opini dan Aspirasi Publik
- 5. Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
- 6. Pengelolaan Media Komunikasi Publik

- 1. Pelayanan Informasi Publik
- 2. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik
- 3. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas

Program Renstra

Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

Indikator Program

Rasio Fasilitas Prasarana Sarana di Seluruh Satuan Kerja Serta Sistem yang Terintegrasi

Kegiatan

Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten

Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten

Sub Kegiatan

- 1. Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra

- 1. Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten
- 2. Koordinasi dan Sikronisasi Data dan Informasi Elektronik
- 3. Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas
- 4. Pengembangan dan Pengelolaan Sumberdaya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah
- 5. Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah (Banprov)



No	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pemanfaatan Teknologi informasi dan Komunikasi dalam Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Sukabumi yang mendukung E-government	Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi informasi dan Komunikasi dalam Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Sukabumi yang mendukung E-government	Meningkatnya Kualitas Birokrasi dan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Birokrasi dan Kualitas Pelayanan Publik	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Jumlah Informasi yang di Publikasikan Melalui Media yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah, Media Massa, Media Cetak dan Media Online	1. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Informasi yang di publikasikan secara cepat dan tepat
					Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Rasio Fasilitas Prasarana Sarana di Seluruh Satuan Kerja Serta Sistem yang Terintegrasi	1. Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten	Jumlah Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi

							2. Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten	Jumlah Dokumen SPBE
					Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Prosentase Tingkat Keamanan Informasi	1. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan Sertifikat Elektronik
							2. Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pola Hubungan Sandi yang di tetapkan dan pemeliharaannya
					Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Prosentase Data Statistik Sektoral yang di update secara berkala	1. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Jumlah Buku Statistik Sektoral